



2021

Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Kepulauan Riau



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



2021

Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Kepulauan Riau

Indeks

Pembangunan Manusia

Provinsi Kepulauan Riau 2021

ISSN : 2776-5539
No. Publikasi : 21550.2101
Katalog : 1101002.2104

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x + 62 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Pencetak Oleh:

CV. Berkah Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

**Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Riau 2021**

Pengarah

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Penyunting

Putri Wahyu Handayani, SST, M.S.E

Naskah

Utary Hafiza, SST

Desain Kover dan Penata Letak

Utary Hafiza, SST

<https://kepulauanbpsno.id>

Kata Pengantar

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2021” merupakan publikasi yang disajikan berkala setiap tahun. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai capaian dan perkembangan indeks pembangunan manusia provinsi kepulauan riau hingga tingkat kabupaten/kota. Publikasi ini juga membahas disparitas pembangunan manusia di Kepulauan Riau, tantangan yang dihadapi, serta implikasi kebijakan terkait.

Data yang digunakan dalam publikasi ini sebagian besar bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan bulan Agustus 2021 (terutama data ketenagakerjaan). Namun demikian, ada juga data dari sumber lain (data sekunder).

Publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan akademisi dalam menyusun strategi kebijakan daerah guna mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan yang menempatkan penduduk sebagai fokus utamanya.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang berkualitas dan sejahtera.

Tanjungpinang, Maret 2022
Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Riau
Kepala,



Darwis Sitorus, S.Si, M.Si



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	6
Bab II Metodologi	7
2.1. Konsep Pembangunan Manusia	9
2.2. Mengukur Pembangunan Manusia	10
2.3. Perubahan Metodologi IPM	11
Bab III Capaian Pembangunan Manusia Kepulauan Riau	13
3.1. Posisi Kepulauan Riau	15
3.2. Capaian Pembangunan Manusia di kabupaten/kota	16
Bab IV Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau	21
Perkembangan Pembangunan Manusia Kepulauan Riau	23
Bab V Tantangan Pembangunan Manusia Kepulauan Riau	31
5.1. Tantangan di Bidang Kesehatan	33
5.2. Tantangan di Bidang Pendidikan	37
5.3. Tantangan di Bidang Ekonomi	39
Bab VI Disparitas Pembangunan Manusia Kepulauan Riau	43
Disparitas Pembangunan Manusia Kepulauan Riau	45
Bab VII Implikasi Kebijakan	53
7.1. Kesimpulan	55
7.2. Implikasi Kebijakan	55
Lampiran	59

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru IPM.....	12
Gambar 3.1.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2021	15
Gambar 3.2.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	16
Gambar 4.1.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021	23
Gambar 4.2.	Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021	24
Gambar 4.3.	Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2015-2021	25
Gambar 4.4.	Perkembangan Rata-Rata Umur Harapan Hidup saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Tahun), 2015-2021.....	26
Gambar 4.5.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2015-2021	27
Gambar 4.6.	Pertumbuhan per Tahun Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021.....	28
Gambar 4.7.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2015-2021	28
Gambar 4.8.	Pertumbuhan per Tahun Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021.....	29
Gambar 4.9.	Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Juta Rupiah), 2015-2021	30
Gambar 4.10.	Pertumbuhan per Tahun Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021	30
Gambar 5.1.	Perkembangan Angka Kesakitan Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2015-2021.....	33

Gambar 5.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	35
Gambar 5.3.	Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	36
Gambar 5.4.	APS Menurut Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2021.....	37
Gambar 5.5.	APM Menurut Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2021.....	38
Gambar 5.6.	PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	39
Gambar 5.7.	Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021.....	40
Gambar 5.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	41
Gambar 6.1.	Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB Provinsi Kepulauan Riau, 2021.....	45
Gambar 6.2.	Perkembangan Disparitas IPM di Kepulauan Riau, 2015-2021.....	47
Gambar 6.3.	Perkembangan Disparitas UHH di Kepulauan Riau, 2015-2021.....	47
Gambar 6.4.	Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	49
Gambar 6.5.	Perkembangan Disparitas RLS di Kepulauan Riau, 2015-2021.....	49
Gambar 6.6.	Perkembangan Disparitas HLS di Kepulauan Riau, 2015-2021.....	50
Gambar 6.7.	Perkembangan Disparitas Pengeluaran per kapita per Tahun yang Disesuaikan di Kepulauan Riau, 2015-2021	51



Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada dua dekade terakhir ini, banyak kajian yang dilakukan oleh dunia internasional terkait dengan manusia sebagai objek dan tujuan utama dalam pembangunan. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dimana sebelum tahun 1970-an keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP). Faktanya, masih dijumpai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun kualitas manusianya masih rendah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan seharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga peningkatan kualitas manusianya dan sudah sepantasnya manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi, dimana sebagian aspek pembangunan tertentu berhasil dan sebagian aspek pembangunan lainnya gagal. Pertanyaannya yaitu bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Development Programme* (UNDP) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi pengetahuan, sedangkan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur standar hidup layak.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (*Solow Model*). Modal manusia yang berkualitas diyakini menjadikan kinerja ekonomi yang lebih baik. Kualitas modal manusia ini dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan. Demi memacu pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas perlu pula dilakukan pembangunan manusia. Untuk itu, dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia yang dapat ditafsirkan juga sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya melihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi suatu daerah sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi daerah itu harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan daerah dapat menjamin bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan daerah.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah semakin bergairah menuju ke arah yang lebih baik. Namun perlu disadari, perubahan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan tetapi secara bertahap sesuai dengan proses kebijakan yang berjalan. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Adanya otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan yang bermuatan kearifan lokal, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Seperti contoh wilayah perkotaan yang sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dibanding daerah lain di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak pada berpindahnya penduduk yang berkualitas ke kota. Sebagai konsekuensinya, daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yang relatif rendah.

Sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Riau 2005-2021, maka sudah selayaknya pembangunan daerah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang bercorak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyat harus diikutsertakan dalam seluruh proses pembangunan. Artinya, rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan tetapi juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri.

Untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, tentunya dibutuhkan masyarakat yang tidak hanya unggul dari segi kuantitas tetapi juga maju dari segi kualitas. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah daerah tersebut merupakan prasyarat penting untuk mencapai masyarakat Kepulauan Riau yang berkualitas.

Saat ini tampaknya perhatian pemerintah daerah terpusat pada isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogyanya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini. Selain itu, menarik pula untuk dilihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM.

Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, barangkali perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antarwilayah, khususnya pada level provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kesadaran akan demokrasi, desentralisasi menjadi salah satu pilihan dalam upaya menggerakkan roda pembangunan. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien sehingga mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisis mengenai capaian IPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta disparitasnya di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021. Semakin menarik untuk dicermati dan diamati bagaimana kondisi pembangunan manusia Kepri selama masa pandemi Covid19.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan permasalahan strategis yang paling mendesak dan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia serta masukan bagi pemerintah daerah sebagai alat bantu perencanaan (*planning tool*) pembangunan yang lebih mengakomodasi dimensi pembangunan manusia. Misalnya melalui peningkatan anggaran pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat pra sejahtera agar dapat mandiri secara ekonomi.

1.2. Tujuan

Publikasi ini disusun dengan beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menyediakan data IPM dan komponennya untuk level provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek pendidikan.
- c. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek kesehatan.
- d. Mengidentifikasi capaian dan tantangan pembangunan sumber daya manusia dari aspek pembangunan ekonomi.



Bab II

Metodologi

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choices*). Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Produktivitas Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah.
2. Pemerataan Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia dan lingkungan harus selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Konsep pembangunan manusia ini berbeda dengan konsep klasik pembangunan yang dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia ditekankan pada manusia itu sendiri sebagai objek sekaligus sebagai subjek pembangunan sehingga masyarakat memperoleh perluasan pilihannya untuk hidup dengan kebebasan dan bermartabat. Selain itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Pembangunan suatu wilayah yang pada awalnya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita dimana pembangunan tersebut cenderung memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi, namun seiring dengan perkembangan zaman paradigma seperti ini mulai bergeser yakni dengan melibatkan peranan manusia sebagai tujuan dari pembangunan (kesejahteraan masyarakat). Pendekatan pembangunan manusia yang menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat (pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural) dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

2.2. Mengukur Pembangunan Manusia

Dalam mengukur pembangunan manusia secara ideal dibutuhkan banyak indikator karena seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa pembangunan manusia dilakukan secara komprehensif di seluruh bidang kehidupan, namun terlalu banyak indikator akan memberikan gambaran yang membingungkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur pembangunan manusia yang dipakai secara luas di seluruh negara.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dikembangkan oleh pemenang nobel India, Amartya Sen, dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari *Yale University* dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics*. Kemudian pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan IPM dan mempublikasikannya secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni: (1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (2) pengetahuan (*knowledge*), dan (3) standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Manfaat IPM diantaranya adalah merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara serta bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.3. Perubahan Metodologi IPM

Sejarah Perjalanan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi pemerintah vertikal yang diberikan kewenangan untuk menghitung angka IPM di Indonesia. BPS menggunakan acuan dari UNDP dalam mempublikasikan angka IPM. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, angka IPM telah mengalami penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995.

Angka IPM pertama kali yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat (dengan menggunakan proksi angka harapan hidup saat lahir), dimensi pengetahuan (dengan menggunakan proksi angka melek huruf dewasa, dan dimensi standar hidup layak (dengan menggunakan proksi PDB per kapita). Ketiga dimensi tersebut diagregatkan menjadi sebuah indeks komposit dengan menggunakan rata-rata aritmatik sehingga menghasilkan angka IPM.

Tahun 1991, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan, sehingga sejak saat itu terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yakni angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Pemberian bobot mutlak dilakukan dalam penghitungan dimensi pengetahuan yakni bobot dua pertiga untuk indikator angka melek huruf dan sisanya satu per tiga untuk indikator rata-rata lama sekolah.

Tahun 1995, UNDP kembali melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan mengganti indikator rata-rata lama sekolah menjadi angka partisipasi kasar gabungan. Pembobotan masih tetap sama seperti pada sebelumnya yakni dua per tiga untuk angka melek huruf dan satu per tiga untuk gabungan angka partisipasi kasar.

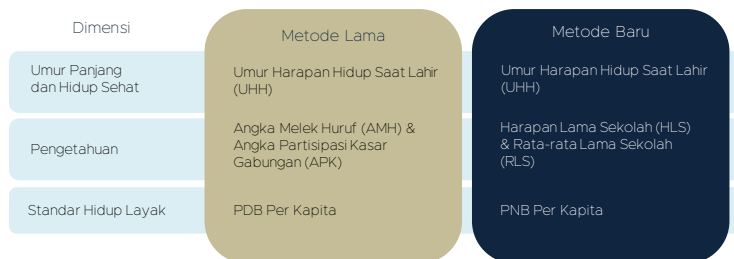
Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM secara drastis. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator angka partisipasi kasar gabungan diganti dengan indikator harapan lama

sekolah. Kemudian, indikator PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan indeks kompositnya pun ikut berubah dimana sebelumnya menggunakan metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik. Mengingat banyak perubahan yang terjadi dalam penghitungan IPM tahun 2010 ini, maka UNDP menyebut metode penghitungan IPM yang berubah pada tahun 2010 ini sebagai metode baru.

Perubahan ternyata tidak berhenti sampai disitu saja. Tahun 2011, penyempurnaan dilakukan pada tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 diganti menjadi tahun 2005. Kemudian pada tahun 2014, dua penyempurnaan kembali dilakukan yakni (1) mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi tahun 2011 dan (2) merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Keseluruhan perubahan yang terjadi didasarkan pada alasan-alasan rasional:

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Seperti Angka Melek Huruf (AMH) dan PDB per kapita. AMH dianggap sudah tidak sensitif lagi dalam mengukur dimensi pengetahuan karena di sebagian besar wilayah angkanya sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pengetahuan (pendidikan) antarwilayah dengan baik. Sedangkan PDB per kapita dianggap kurang relevan untuk mengukur dimensi standar hidup layak karena masih mengandung faktor produksi asing yang tidak dinikmati oleh penduduk lokal. Oleh karena itu PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik memiliki kekurangan yakni capaian dimensi yang rendah dapat ditutupi oleh capaian dimensi yang tinggi. Padahal pada dasarnya konsep yang diusung oleh pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan.



Gambar 2.1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru IPM

BAB III

Capaian Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

IPM
Kepulauan Riau
tahun 2021

75,79

UHH
70,12



HLS: 12,98
RLS: 10,18



Pengeluaran
per kapita yang
d disesuaikan

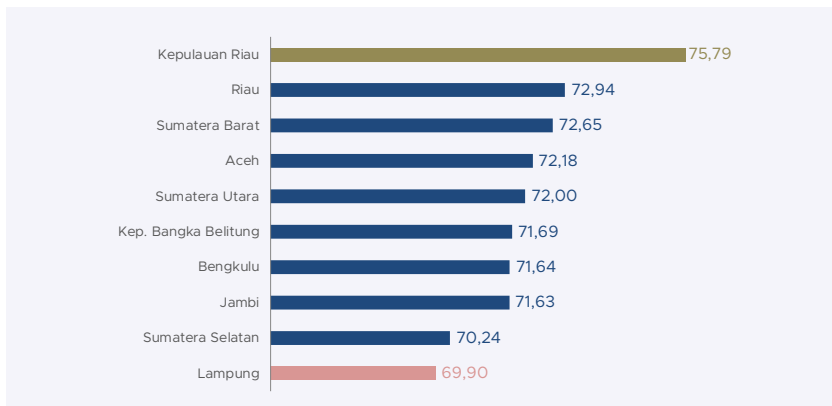
Rp 14,12Juta



3.1. Posisi Kepulauan Riau

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan rendah ($IPM < 60$). Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2021 termasuk dalam kategori tinggi. Capaian ini menghantarkan Kepulauan Riau berada pada posisi ke empat dari seluruh provinsi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Angka IPM Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 75,79 dimana angka IPM tersebut merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat (melalui indikator Umur Harapan Hidup-UHH), pengetahuan (melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah-RLS dan Harapan Lama Sekolah-HLS), serta standar hidup layak (melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Umur harapan hidup Kepulauan Riau tahun 2021 sebesar 70,12, berarti bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2021 memiliki peluang untuk hidup hingga 70,12 tahun. Lebih lama 0,16 tahun dibandingkan mereka yang lahir pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing sebesar 10,18 dan 12,98. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,18 menunjukkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,18 tahun, meningkat 0,06 tahun dibandingkan kondisi tahun 2020. Sementara itu, harapan lama sekolah sebesar 12,98 menunjukkan adanya harapan baru bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,98 tahun, lebih lama 0,11 tahun dibandingkan kondisi tahun 2020. Terakhir, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai 14,122 juta rupiah per tahun, menurun 87 ribu rupiah dibandingkan tahun 2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik

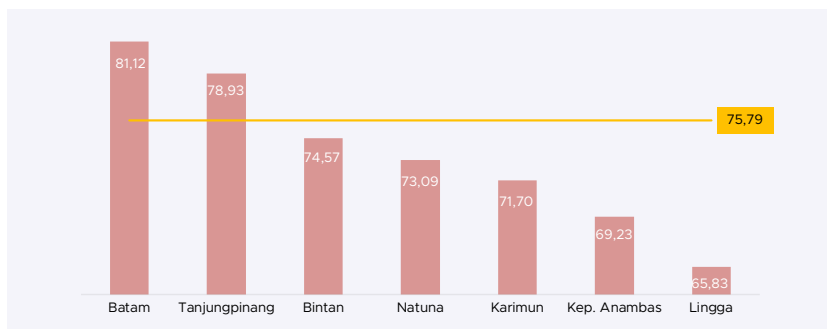
Gambar 3.1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2021

Berdasarkan Gambar 3.1. tentang gambaran IPM provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera, maka di regional Sumatera posisi IPM Kepulauan Riau menduduki posisi teratas. Hal tersebut menjadi kebanggaan mengingat Kepulauan Riau tergolong provinsi baru namun mampu bersaing dengan provinsi yang sudah lebih lama terbentuk. Pada tahun 2021, hanya ada satu provinsi di regional Sumatera yang masuk dalam kategori IPM “sedang” yakni Lampung dengan nilai IPM 69,90. Sedangkan provinsi lainnya yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan masuk dalam kategori IPM “tinggi”. IPM Riau dan Sumatera Barat menjadi IPM tertinggi kedua dan ketiga setelah Kepulauan Riau.

3.2. Capaian Pembangunan Manusia di kabupaten/kota

Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 75,79 dan telah berstatus “tinggi”, sedangkan capaian IPM di tingkat kabupaten/kota bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda-beda. Capaian pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata.

Capaian IPM kabupaten/kota tertinggi di Kepulauan Riau tahun 2021 yaitu Kota Batam dengan angka IPM mencapai 81,12 atau berstatus “sangat tinggi”. Sementara itu, capaian IPM terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan angka IPM sebesar 65,83 atau berstatus “sedang”. Adapun kabupaten/kota lain yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun berstatus IPM “tinggi”, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas berstatus “sedang”.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.2. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota ditunjukkan oleh Gambar 3.2. Pembangunan manusia Kota Batam dan Kota Tanjungpinang lebih baik dari Provinsi Kepulauan Riau secara umum. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka IPM kedua kota tersebut yang berada di atas angka IPM Provinsi Kepulauan Riau. Sebaliknya, lima kabupaten lainnya memiliki angka IPM di bawah angka provinsi yaitu Kabupaten Bintan dengan angka IPM 74,13; Kabupaten Natuna dengan angka IPM 72,72; Kabupaten Karimun dengan angka IPM 71,44; serta Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga masing-masing dengan angka IPM 68,80 dan 65,29.

Pencapaian pembangunan manusia yang tercermin melalui IPM bukan semata-mata hanya diukur dari tingginya capaian IPM saja, namun juga perlu dikaji lebih dalam lagi sejauh mana kecepatan pembangunan manusia pada suatu periode tertentu. Proses pencapaian pembangunan manusia inilah yang menjadi poin penting karena secara filosofi untuk mencapai suatu rangking atau posisi yang baik diperlukan *effort* lebih. Kecepatan pertumbuhan IPM merupakan salah satu indikator yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia.

Batam dengan Angka IPM Tertinggi di Kepulauan Riau

Sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau, Batam dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai suku, bangsa, agama, dan ras. Secara ekonomi, Batam merupakan pusat industri di wilayah Semenanjung Malaka yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi daya tarik Batam, penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan dari luar negeri berbondong-bondong ke Batam untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tidaklah mengherankan jika sebutan kota metropolitan layak disandangkan oleh Batam. Selain itu, Batam juga menjadi penopang utama perekonomian Kepulauan Riau karena lebih dari separuh perekonomian Kepulauan Riau bersumber dari Batam.

Indeks Pembangunan Manusia Batam tahun 2021 mencapai 81,12 dan berstatus “sangat tinggi”. Tingginya IPM Batam didorong oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat masyarakat Batam yang sudah sangat baik. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang didekati oleh indikator UHH, dimana UHH Batam mencapai 73,36. Artinya penduduk Batam yang baru lahir pada tahun 2021 berpeluang untuk hidup sampai dengan 73 tahun mendatang. Faktor pendorong tingginya IPM Batam yang kedua adalah dimensi pengetahuan, dimana rata-rata lama sekolah penduduk Batam mencapai 11,15 tahun dan angka harapan lama sekolah mencapai 13,17 tahun. Sebagian besar penduduk Batam telah sadar akan pentingnya

tingkat pendidikan dan pemerintah daerah memberikan fasilitas pendidikan yang layak. Sementara itu, dimensi standar hidup layak masih menjadi faktor penahan laju pertumbuhan IPM Batam, dimana pengeluaran perkapita yang disesuaikan Batam pada tahun 2021 masih lebih rendah dibanding tahun 2020. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Batam sebesar Rp 18,03 juta per tahun. Capaian IPM Batam yang sudah baik dan harus dipertahankan yaitu pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, sedangkan untuk dimensi pengetahuan dan standar hidup layak perlu ditingkatkan agar pembangunan manusia tercapai secara merata di seluruh bidang kehidupan.

Lingga sebagai Kabupaten dengan Pertumbuhan IPM Tercepat

Secara singkat, Kabupaten Lingga merupakan asal-usul kerajaan melayu yang ada di Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sejarah melayu sangat kental terasa di Kabupaten Lingga. Pusat kerajaan berada di Kota Daik, maka tidak heran jika Kabupaten Lingga dijuluki Bunda Tanah Melayu. Secara geografis, Kabupaten Lingga berbatasan dengan Kota Batam dan Laut Natuna Utara di sebelah utaranya, kemudian sebelah selatan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala, sebelah barat dengan Laut Indragiri Hilir, Riau dan sebelah timur dengan Laut Natuna Utara. Kabupaten Lingga memiliki 13 kecamatan dengan luas total 2.216,04 km². Kabupaten Lingga terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Singkep dan Pulau Lingga.

Pemerintah Kabupaten Lingga terus melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan IPM daerah Lingga. Program tersebut menasar di seluruh dimensi dari komponen-komponen IPM. Hal tersebutlah yang mendorong pertumbuhan IPM Lingga selama tahun 2021 menjadi IPM dengan pertumbuhan tercepat, yaitu sebesar 0,827 persen jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Meskipun IPM Kabupaten Lingga hingga saat ini masih menjadi yang terendah, namun bukan tidak mungkin jika percepatan Kabupaten Lingga yang terus konsisten dari tahun ke tahun akan meningkatkan posisi IPM Kabupaten Lingga kedepannya.

Kabupaten Lingga telah dinobatkan sebagai Kabupaten dengan pertumbuhan IPM tercepat di Kepulauan Riau selama kurun waktu 7 tahun terakhir (dari tahun 2015 sampai tahun 2021), meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan IPM yang tercepat adalah Kabupaten Karimun. Selama periode tersebut, angka IPM Lingga tumbuh sampai dengan 7,42 persen atau meningkat 1,06 persen per tahunnya.

IPM Kabupaten Lingga tahun 2021 mencapai 65,83 atau berstatus IPM “sedang”. Angka harapan hidup saat lahir yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat mencapai 62,39, yang berarti bahwa bayi yang baru

lahir pada tahun 2021 di Kabupaten Lingga memiliki peluang untuk hidup hingga 62,39 tahun. Sementara itu, pada dimensi pengetahuan yang diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 6,88 dan 12,59. Rata-rata lama sekolah sebesar 6,88 diartikan bahwa penduduk Lingga yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 6,88 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolah sebesar 12,59 diartikan bahwa rata-rata anak berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,98 tahun. Dari dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita Kabupaten Lingga mencapai 11,938 juta rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau, pengeluaran per kapita Kabupaten Lingga merupakan terendah kedua, setelah Kabupaten Karimun.

Harapan Lama Sekolah di Tanjungpinang Tertinggi se-Kepulauan Riau

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pusat pemerintahan, Tanjungpinang memiliki fasilitas publik yang cukup memadai. Fasilitas publik tersebut digunakan sebagai alat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Mencapai kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan manusia secara menyeluruh. Pembangunan manusia di Tanjungpinang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program kerja pemerintah daerah di samping peningkatan ekonominya.

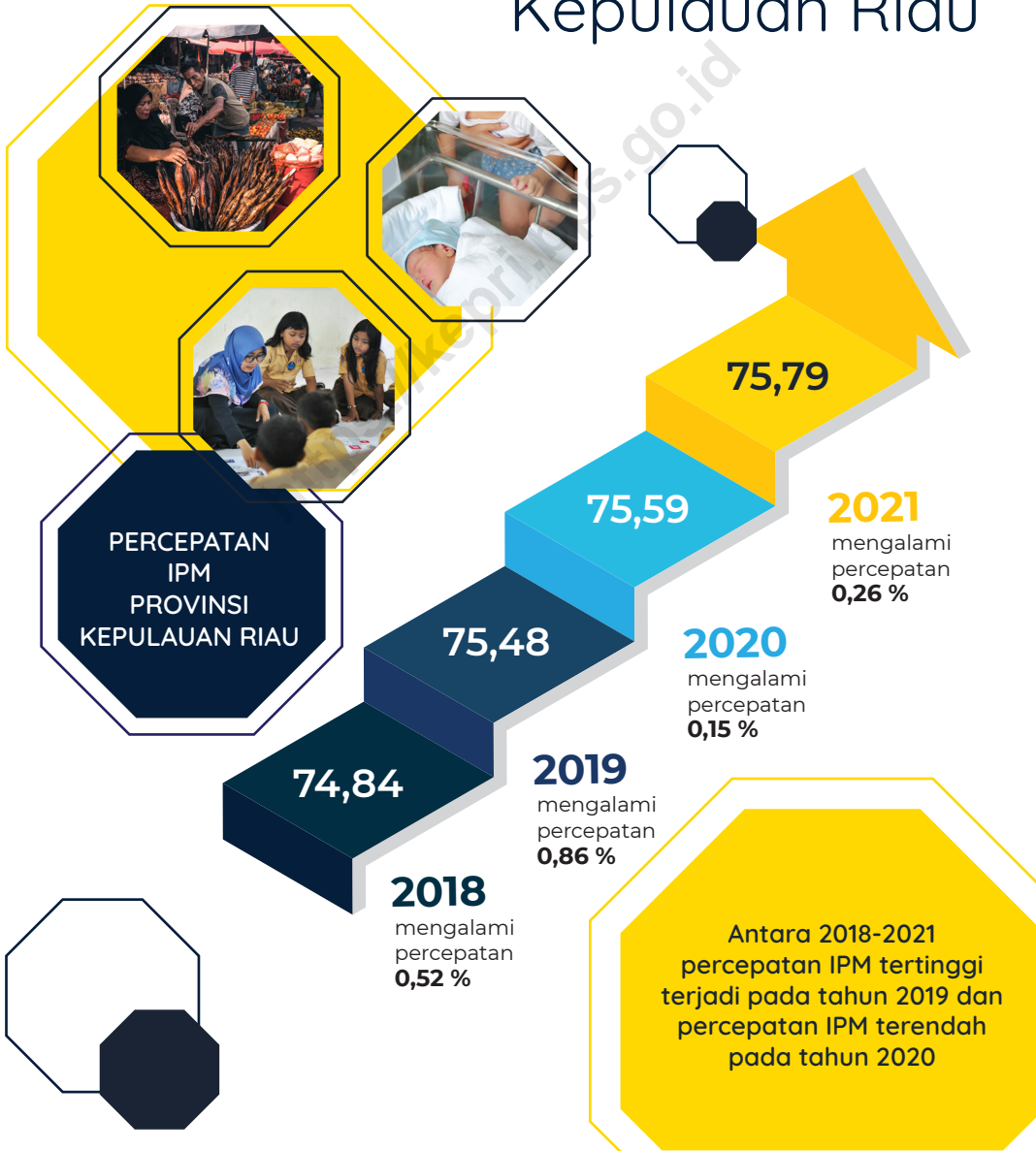
Angka IPM Tanjungpinang tahun 2021 mencapai 78,93 atau berstatus “tinggi”. Tingginya pembangunan manusia di Tanjungpinang didorong oleh tingginya pencapaian dimensi umur panjang dan hidup sehat dan pengetahuan. Angka harapan hidup saat lahir penduduk Tanjungpinang sebesar 72,18 tahun. Sementara itu, dimensi pengetahuan yang diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah masing-masing mencapai 10,26 tahun dan 14,13 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,26 tahun dapat diartikan bahwa penduduk Tanjungpinang yang berumur 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 10,26 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah mencapai 14,13 tahun yang berarti bahwa penduduk berumur 7 tahun di Tanjungpinang memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,13 tahun. Angka harapan lama sekolah di Tanjungpinang sebesar 14,13 merupakan yang tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Hal ini mengandung arti bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Tanjungpinang lebih layak dan memadai. Pembentuk angka IPM lainnya yakni pengeluaran per kapita di Tanjungpinang tahun 2021 mencapai 15,439 juta rupiah per tahun. Dari keempat indikator pembentuk IPM,

indikator pengeluaran per kapita inilah yang paling rendah pencapaiannya. Pengeluaran per kapita di Tanjungpinang lebih rendah sekitar 59 ribu rupiah dibanding tahun lalu. Dengan demikian, masih ada peluang yang sangat lebar untuk meningkatkan pembangunan manusia Tanjungpinang dari sisi ekonominya.

<https://kepri.bps.go.id>

BAB IV

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

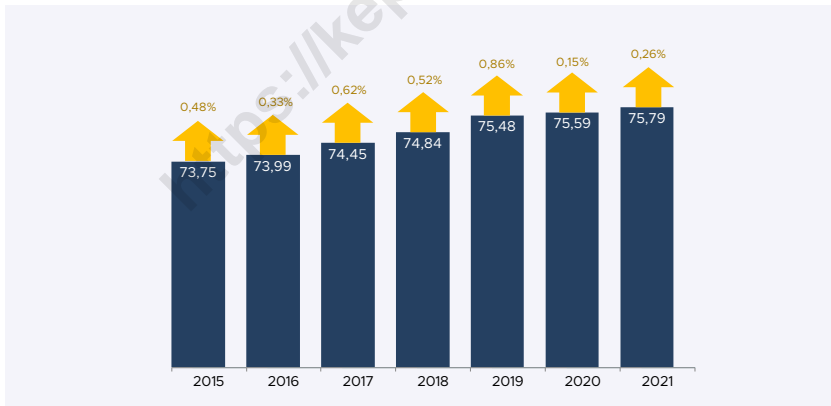


Perkembangan Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau Terus Meningkat

Pembangunan manusia Kepulauan Riau selama periode 2015-2021 semakin membaik. BPS mencatat angka IPM Kepulauan Riau tahun 2015 sebesar 73,75 dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Posisi terakhir angka IPM Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 75,79. Angka IPM yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulauan Riau dari segi kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin membaik.

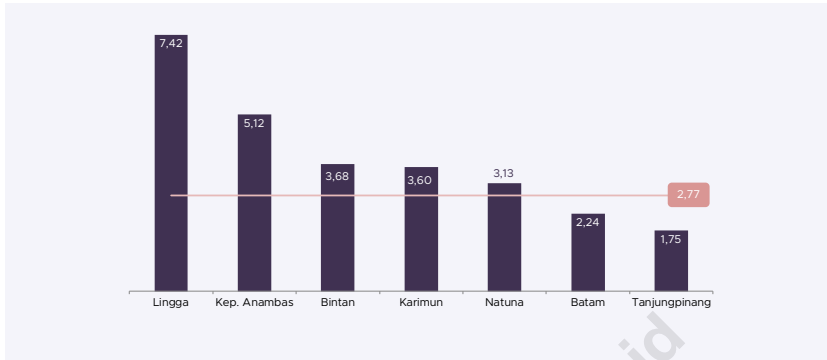
Desentralisasi pemerintahan di wilayah Indonesia ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Setiap pemerintah daerah saling berlomba untuk memakmurkan masyarakatnya. Hal ini berdampak positif pada pembangunan manusia dimana terlihat semakin membaik dari waktu ke waktu. IPM sebagai tolak ukur pembangunan manusia dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021

Jika melihat dari Gambar 4.1. maka pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,86 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,15 persen. Pola perkembangan angka IPM kabupaten/kota di Kepulauan Riau secara umum sama dengan IPM Kepulauan Riau yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.2. Pertumbuhan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021

Selama periode 2015 hingga 2021, beberapa wilayah mencatat perkembangan yang cukup menggembirakan. Bahkan, ada satu kabupaten yang mencapai pertumbuhan IPM di atas tujuh persen selama periode tersebut, yaitu Kabupaten Lingga yang mengalami pertumbuhan IPM sebesar 7,42 persen. Sementara itu, pertumbuhan IPM paling lambat selama tujuh tahun terakhir yaitu Kota Tanjungpinang dengan pertumbuhan sebesar 1,75 persen.

Adapun rata-rata pertumbuhan IPM per tahun (2015-2021) mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah yaitu Kabupaten Lingga dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 1,06 persen, Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,73 persen, Kabupaten Bintan sebesar 0,53 persen, Kabupaten Karimun sebesar 0,51 persen, Kabupaten Natuna sebesar 0,45 persen, Kota Batam sebesar 0,32 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 0,25 persen.

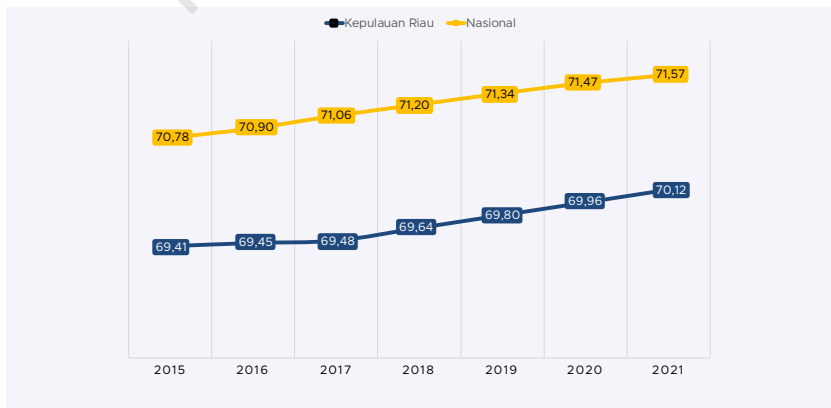
Apabila ditelusuri lebih jauh, wilayah yang mencatat perkembangan tercepat sebagian besar merupakan wilayah dengan capaian IPM rendah. Capaian IPM rendah bukan menjadi hambatan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Terbukti bahwa wilayah dengan capaian pembangunan manusia yang masih rendah memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat dibanding wilayah dengan capaian yang sudah tinggi.

Umur Harapan Hidup Meningkat, Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat Membaik

Kesehatan merupakan investasi penting bagi manusia. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat manusia tidak dapat melakukan aktivitas dengan keadaan tubuh yang tidak sehat. Untuk itu, dewasa ini telah banyak berkembang ilmu kesehatan dalam hal mendukung manusia untuk tetap sehat sehingga peluang hidup lebih panjang semakin tinggi.

Salah satu tujuan pembangunan manusia adalah memperluas pilihan-pilihan manusia untuk hidup lebih lama (berumur panjang). Proksi umur panjang dan hidup sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator umur harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator ini merupakan gambaran dari keadaan kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup saat lahir mengandung arti harapan hidup seorang bayi yang baru lahir. Semakin tinggi umur harapan hidup saat lahir maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pula kesehatan masyarakat di suatu wilayah.

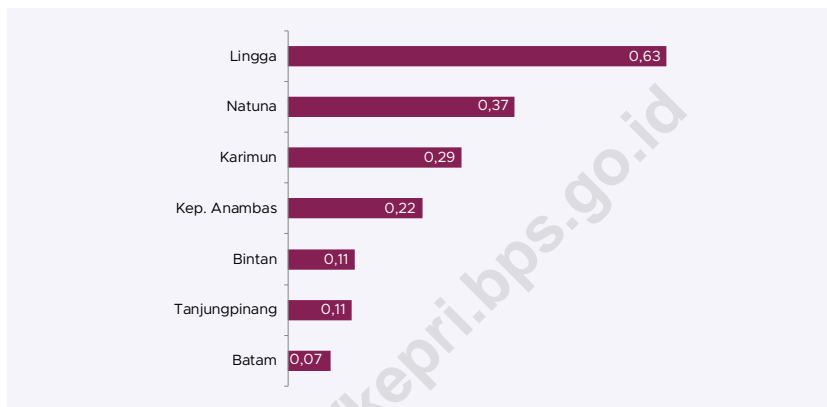
Selama periode 2015-2021, umur harapan hidup (UHH) saat lahir Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, UHH saat lahir Kepulauan Riau tumbuh sebesar 0,15 persen setiap tahunnya. Meskipun terus meningkat, namun UHH saat lahir Kepulauan Riau masih berada di bawah angka nasional (rata-rata UHH seluruh provinsi di Indonesia). UHH saat lahir Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 70,12, artinya bayi yang lahir hidup pada tahun 2021 di Kepulauan Riau mempunyai peluang untuk hidup hingga 70,12 tahun.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.3. Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2015-2021

Secara spasial, kondisi umur harapan hidup saat lahir kabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2015-2021 juga mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, pertumbuhan umur harapan hidup masing-masing kabupaten/kota bervariasi antara 0,49 persen sampai dengan 4,38 persen. Pertumbuhan umur harapan hidup tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.4. Pertumbuhan per Tahun Umur Harapan Hidup saat Lahir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021

Kabupaten Lingga dengan angka UHH terendah ternyata memiliki pertumbuhan UHH yang lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Lingga dalam mengejar ketertinggalan kesehatan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Sementara itu, Kota Batam yang mempunyai nilai UHH tinggi, pertumbuhan UHH-nya lebih lambat.

Pendidikan Membaik, Wawasan Masyarakat Semakin Luas

Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Dengan pendidikan yang tinggi, maka peluang seseorang untuk mendapatkan kesehatan dan pekerjaan yang layak semakin terbuka lebar. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Dimensi pengetahuan dalam kaitannya dengan penghitungan IPM didekati dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama

Sekolah (HLS). Semakin tinggi angka RLS dan HLS maka pembangunan manusia dari sisi pengetahuan semakin baik pula.

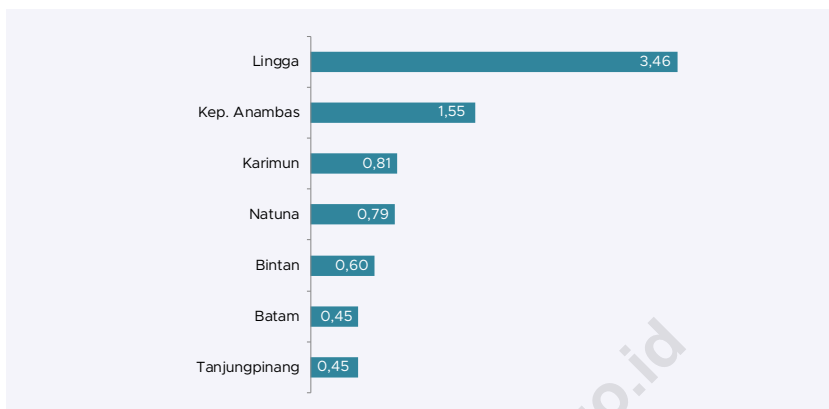
Selama periode 2015-2021, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,78 persen. Rata-rata lama sekolah di Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 10,18, artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kepulauan Riau rata-rata telah menempuh pendidikan formal selama 10,18 tahun. Angka RLS Kepulauan Riau selalu berada di atas angka RLS nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.5. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2015-2021

Pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di kabupaten/kota memiliki pola yang sama dengan Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Selama periode 2015-2021, rata-rata lama sekolah penduduk kabupaten/kota di Kepulauan Riau terus meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Lingga, dimana selama tujuh tahun terakhir rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas tumbuh sebesar 24,19 persen atau 3,46 persen per tahunnya, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 3,12 persen atau 0,45 persen per tahunnya. Lambatnya pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Tanjungpinang karena tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Tanjungpinang relatif sudah baik.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.6. Pertumbuhan per Tahun Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021

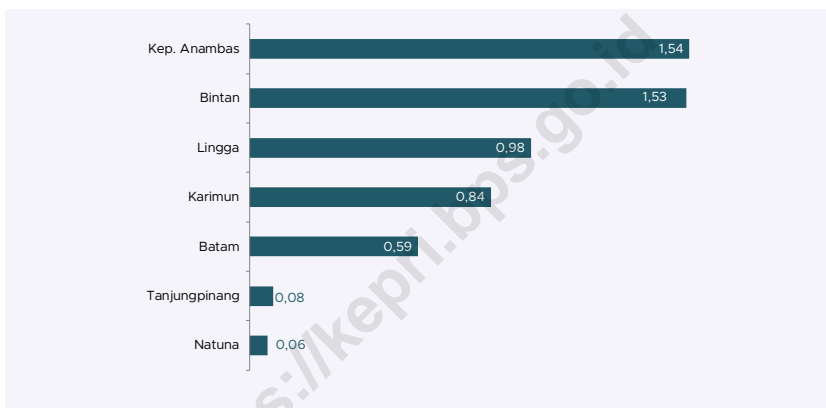
Selain RLS, HLS juga menggambarkan tingkat pengetahuan. Harapan lama sekolah di Kepulauan Riau semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2015-2021, harapan lama sekolah di Kepulauan Riau tumbuh sebesar 3,02 persen atau tumbuh 0,43 persen per tahunnya. Harapan lama sekolah di Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 12,98, artinya penduduk usia 7 tahun di Kepulauan Riau memiliki peluang untuk bersekolah hingga 12,98 tahun. Dibandingkan angka nasional, HLS Kepulauan Riau masih berada di bawah angka nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.7. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahun), 2015-2021

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pertumbuhan per tahun HLS selama periode 2015-2021 berkisar antara 0,06 hingga 1,54 persen. Pertumbuhan HLS tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir mencapai 10,75 persen atau 1,54 persen per tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai harapan lama sekolah yang semakin membaik setiap tahunnya. Adapun pertumbuhan HLS terendah selama tujuh tahun terakhir terjadi di Kabupaten Natuna, dengan angka pertumbuhan sebesar 0,43 persen atau 0,06 per tahunnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.8. Pertumbuhan per Tahun Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021

Standar Hidup Meningkat, Kesejahteraan Semakin Dekat

Perluasan pilihan penduduk dari sisi ekonomi dapat dilihat dari pendapatan penduduk yang didekati dengan pengeluarannya. Penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai pilihan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk dengan pendapatan rendah atau penduduk miskin. Oleh karena itu IPM mengusung pengeluaran per kapita disesuaikan sebagai salah satu indikator pembangunan manusia yang mewakili dimensi standar hidup layak.

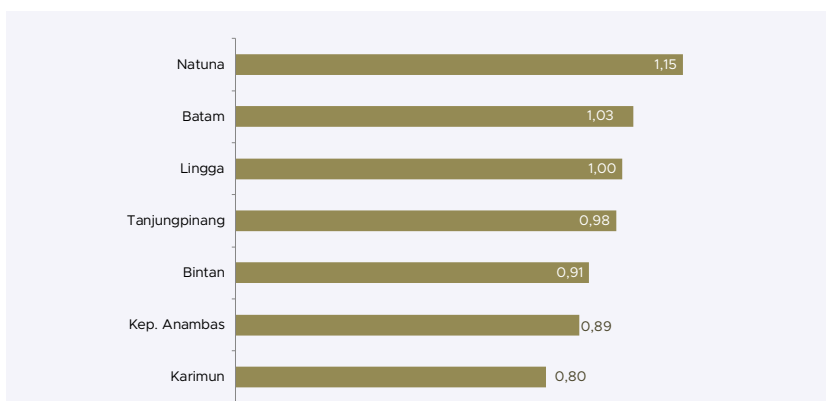
Pengeluaran per kapita disesuaikan Kepulauan Riau selama periode 2015-2021 selalu berada di atas angka nasional. Pengeluaran per kapita disesuaikan tahun 2019 sebesar Rp 14,47 juta per tahun mengalami penurunan menjadi Rp 14,21 juta per tahun pada 2020, dan kembali turun menjadi Rp. 14,12 juta per tahun pada tahun 2021. Penurunan tersebut merupakan salah satu dampak Pandemi Covid-19.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.9. Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun yang Disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Juta Rupiah), 2015-2021

Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota bervariasi, namun pola perkembangan tiap tahunnya sama dengan pola provinsi yakni terus mengalami peningkatan yang positif. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan pengeluaran per kapita tertinggi di Kepulauan Riau, mencapai 8,08 persen atau tiap tahunnya meningkat sekitar 1,15 persen. Sementara itu, Kabupaten Karimun menjadi kabupaten dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita disesuaikan terendah selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Pertumbuhan pengeluaran per kapitadisesuaikan Kabupaten Karimun sebesar 5,61 persen atau tiap tahunnya meningkat 0,80 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 4.10. Pertumbuhan per Tahun Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2015-2021

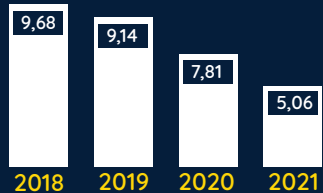
BAB V

Tantangan Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

Tantangan Bidang Kesehatan



Perkembangan
Angka Kesakitan
Provinsi Kepulauan Riau



Tantangan Bidang Pendidikan



Angka
Partisipasi Murni (APM)
Provinsi Kepulauan Riau
2021

SD/MI/Paket A 99,26

SMP/MTs/Paket B 86,60

SMA/SMK/MA/ Paket C 73,36

Tantangan Bidang Ekonomi



PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Riau
2021 (Milyar Rupiah)

Karimun	: 14.195,74
Bintan	: 21.251,13
Natuna	: 20.870,16
Lingga	: 4.499,27
Kep. Anambas	: 16.697,53
Batam	: 172.843,90
Tanjungpinang	: 20.099,37

5.1. Tantangan di Bidang Kesehatan

Salah satu keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah dapat diukur dari tingkat kesehatan masyarakatnya. Untuk mengukur kondisi kesehatan yang dihadapi suatu daerah, digunakanlah sejumlah indikator kesehatan. Di Indonesia, derajat kesehatan masyarakat diukur berdasarkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi, dan morbiditas (kesakitan). Angka mortalitas terdiri dari angka kematian neonatal, angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka harapan hidup. Sementara, morbiditas mengacu pada angka kesakitan sejumlah penyakit pada balita dan dewasa.

Telah disinggung pada Bab 4 bahwa capaian UHH saat lahir Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengandung makna bahwa kualitas pembangunan manusia dari dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kepulauan Riau semakin membaik. Selain itu, tahun 2021 UHH saat lahir Kepulauan Riau mencapai 70,12 yang artinya bayi yang lahir hidup pada tahun 2021 di Kepulauan Riau memiliki peluang untuk hidup hingga 70,12 tahun. Namun demikian, angka tersebut masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 71,57 pada tahun 2021.

BPS mencatat bahwa angka morbiditas (kesakitan) Kepulauan Riau selama periode 2015-2021 cenderung menurun. Angka kesakitan ini merefleksikan persentase penduduk yang mengalami keluhan sakit sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-harinya. Angka kesakitan Kepulauan Riau tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, selama periode 2016- 2021, angka kesakitan Kepulauan Riau terus menurun.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, diolah

Gambar 5.1. Perkembangan Angka Kesakitan Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2015-2021

Berdasarkan teori Henrik L. Blum, tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk yang merupakan ukuran dari derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang paling besar yaitu 45 persen. Sementara itu, pengaruh faktor lainnya masing-masing, perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan keturunan sebesar 5 persen. Keempat faktor tersebut saling terkait dan berinteraksi. (Kasnodihardjo dkk, 1997).

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain, kondisi sanitasi dan akses air bersih. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Faktor sanitasi sangat penting karena dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika sanitasi layak tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap timbulnya berbagai penyakit.

Pada tahun 2021, penduduk Kepulauan Riau yang sudah memiliki akses terhadap sanitasi layak mencapai 91,62 persen, sisanya sekitar 8,38 persen belum memiliki akses terhadap sanitasi layak. Penduduk yang menggunakan fasilitas sanitasi layak tersebut meningkat sebesar 2,72 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 89,19 persen.

Disamping faktor sanitasi layak, akses terhadap air bersih juga merupakan salah satu indikator yang berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat. Dengan adanya pembangunan sarana air bersih di suatu wilayah atau daerah, beberapa infeksi oleh mikrobakteria, misalnya kolera, disentri, tifus, dan lainnya dapat dikurangi (Said, 1999). Namun demikian, suplai air bersih tersebut harus memenuhi standar kesehatan agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, diolah

Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pada tahun 2021, rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang sudah memiliki akses terhadap sumber air minum bersih mencapai 91,99 persen. Sumber air minum bersih yang dimaksud adalah sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding-an (sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat = 10 m).

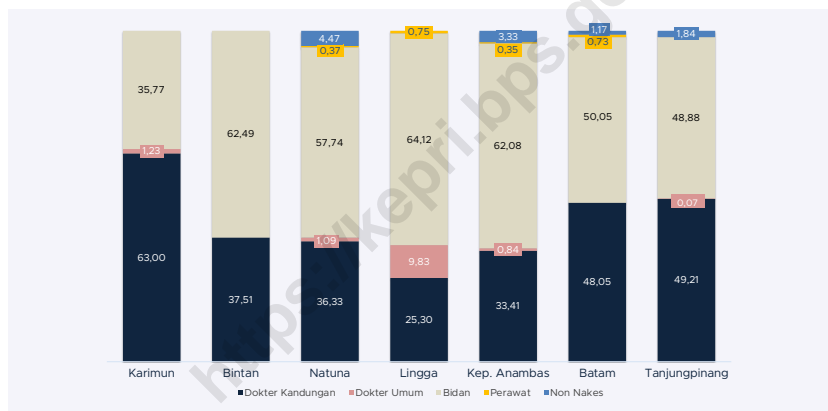
Selain itu, sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan, terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2021, banyaknya rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik baru mencapai 92,37 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut kabupaten/kota, hanya Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang persentasenya sudah berada di atas nilai Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk adalah banyaknya kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Data ini bermanfaat untuk mengukur

tingkat kesadaran masyarakat terhadap persalinan yang sehat serta menakar kualitas dan akses layanan kesehatan utamanya layanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan tingkat kematian ibu dan anak.

Pada tahun 2021, tingkat kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 98,82 persen yang berarti dari 100 kelahiran yang terjadi masih ada sekitar 1 proses kelahiran yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan. Secara rata-rata kondisi persalinan di Provinsi Kepulauan Riau dengan dibantu tenaga kesehatan pada tahun 2021 sudah membaik. Tingkat pemanfaatan tenaga kesehatan sebagai penolong dalam proses persalinan di kabupaten/kota juga sudah cukup tinggi.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, diolah

Gambar 5.3. Persentase Perempuan Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tantangan lain di bidang kesehatan yaitu tenaga medis yang membantu proses kelahiran anak. Secara umum, proses kelahiran anak lahir hidup di Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh bidan (50,29 persen) dan dokter kandungan (47,58 persen). Hal tersebut cukup bagus, meskipun masih ada juga beberapa masyarakat yang memilih untuk melahirkan dibantu non tenaga kesehatan sebesar 1,18 persen.

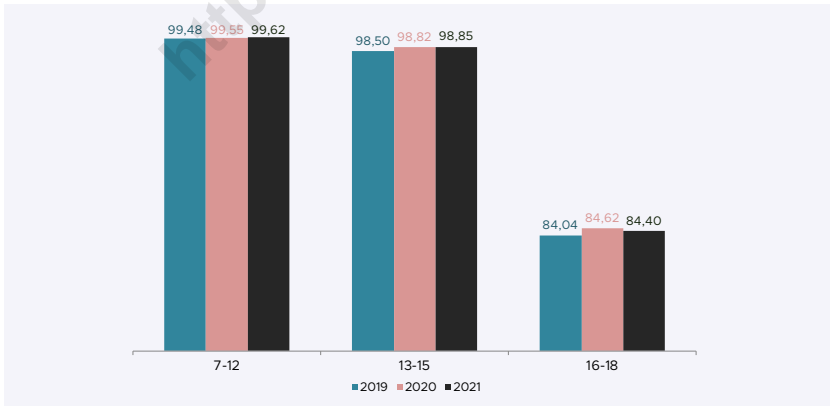
Kualitas kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari perilakunya. Merokok merupakan salah satu pola hidup tidak sehat karena kandungan nikotin di dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata

sebanyak 19,95 persen penduduk Kepulauan Riau yang mengkonsumsi rokok setiap hari. Rata-rata rokok yang dikonsumsi dalam satu minggu sebanyak 110 batang atau sekitar 1 batang rokok tiap 92 menit sekali.

Status gizi merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan penduduk selain AHH dan angka kesakitan. Status gizi pada bayi dapat dilihat dari pemberian Air Susu Ibu (ASI) karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi. Selain itu, ASI juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Bersumber dari Susenas tahun 2021, sebanyak 91,92 persen baduta (penduduk bawah dua tahun) berumur 0-23 bulan pernah diberi ASI. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan akan pentingnya kesehatan.

5.2. Tantangan di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen dalam peningkatan SDM, karenanya kualitas dan mutu pendidikan di provinsi ini harus terus ditingkatkan dan harus terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar kualitas SDM di provinsi ini dapat dibanggakan dan dapat bersaing dengan SDM dari provinsi dan negara lainnya. Tantangan pembangunan manusia bidang pendidikan di Kepulauan Riau tahun 2021 dapat dirangkum sebagai berikut.



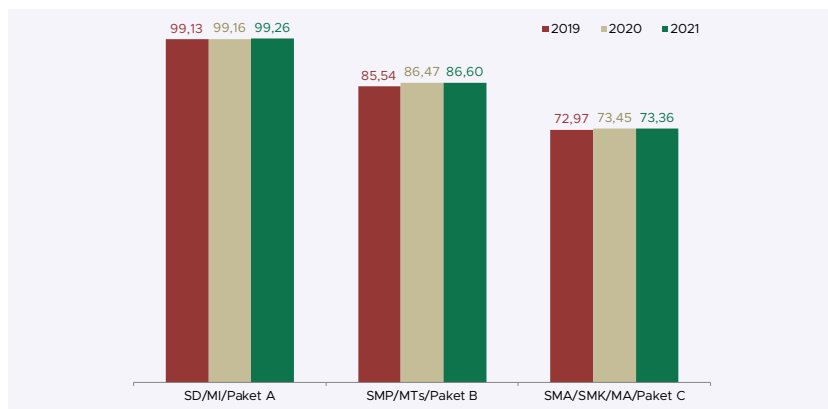
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, diolah

Gambar 5.4. APS Menurut Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2021

Kualitas anak didik merupakan tantangan pertama yang dihadapi dan perlu dikaji lebih mendalam penyebabnya. Kualitas anak didik dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan angka mengulang. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. APS dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan.

Selama tiga tahun terakhir (2019-2021), APS Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat. Hingga tahun 2021, APS pada jenjang usia 7-12 tahun di Kepulauan Riau mencatat hasil yang tinggi yaitu 99,62 persen. Selain itu, APS pada jenjang usia 13-15 tahun juga tinggi yaitu 98,85 persen, sedangkan APS pada jenjang usia 16-18 tahun masih di angka 84,40 persen yang justru turun dari tahun sebelumnya. Dengan melihat capaian APS pada jenjang usia 13-15 tahun yang terus meningkat, jika peningkatan terus konsisten maka akan tercapai pendidikan dasar selama 9 tahun secara menyeluruh.

APS dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Misalnya, APS pada jenjang usia 7-12 mengabaikan informasi anak berusia 12 tahun yang bersekolah pada kelas VII. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang lebih relevan.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, diolah

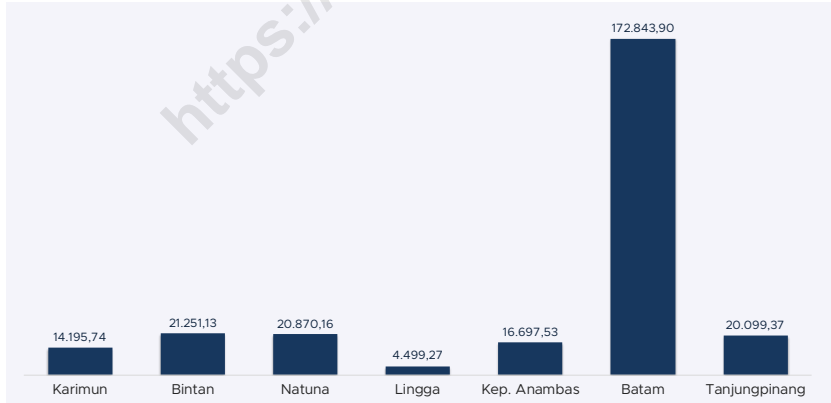
Gambar 5.5. APM Menurut Jenjang Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2021

Selama tiga tahun terakhir (2019-2021), APM Kepulauan Riau cenderung meningkat, hanya APM SMA/SMK/MA/Paket C yang mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, capaian APM SD/MI/Paket A telah mencapai 99,26 persen. Sementara itu, APM SMP/MTs/Paket B sebesar 86,60 persen dan SMA /SMK/MA/Paket C sebesar 73,36 persen.

5.3. Tantangan di Bidang Ekonomi

Sebagai provinsi yang sudah berusia lebih dari sepuluh tahun membangun secara mandiri, banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan tersebut diantaranya sebagai berikut.

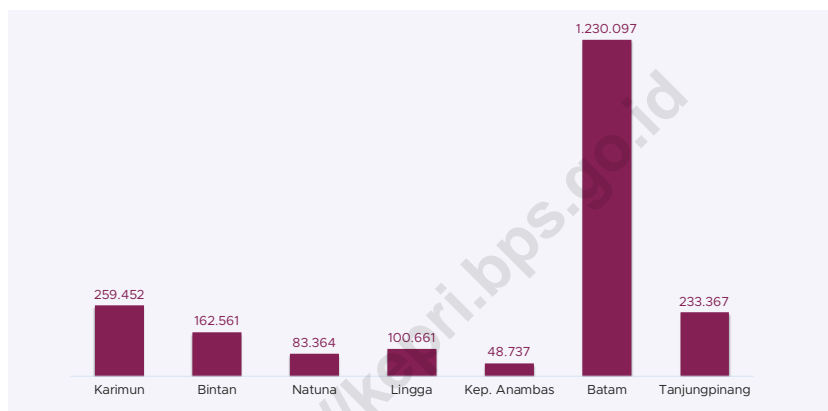
Tantangan Geografis. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dengan total jumlah pulau sebanyak 2.408 pulau besar dan kecil yang tersebar, serta 96 persen wilayahnya adalah lautan tentu membutuhkan strategi pembangunan yang berbeda. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah dan sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah pulau dalam satu kesatuan tata ruang wilayah pulau dan laut.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, diolah

Gambar 5.6. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (miliar rupiah), 2021

Posisi kepulauan yang tersebar seringkali menyebabkan program pembangunan yang dibuat hanya difokuskan pada satu pulau tertentu dengan alokasi program sektoral tertentu tanpa memperhatikan keterpaduan program. Kondisi ketimpangan dalam perekonomian terlihat jelas dari disparitas yang cukup tinggi, lebih dari 60 persen dalam penciptaan PDRB didominasi oleh Kota Batam, dengan pergerakan PDRB yang lambat di kabupaten/kota lainnya.

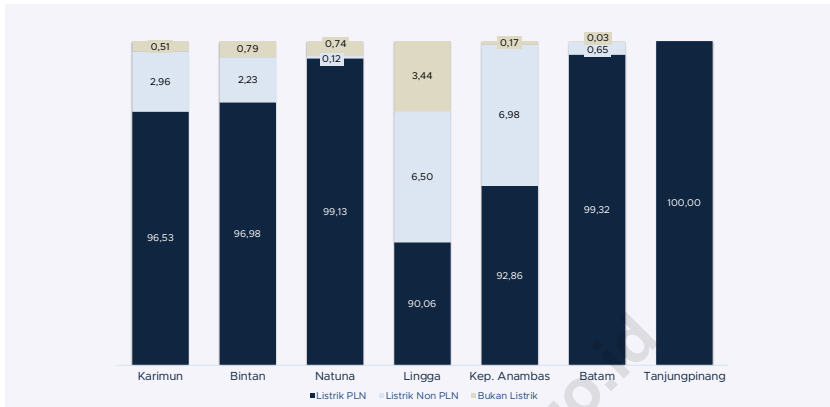


Sumber : Hasil Proyeksi Interim SP2020

Gambar 5.7. Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tantangan Demografis. Dengan jumlah penduduk mencapai 2,12 juta jiwa pada tahun 2021 dengan persebaran yang tidak merata menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Penduduk yang terkonsentrasi di Kota Batam hingga di atas 50 persen dari total penduduk menyebabkan ketimpangan pembangunan yang cukup terasa. Berikut disajikan gambar persebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.

Penyediaan infrastruktur dasar yang belum memadai. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkualitas membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai, antara lain transportasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi terutama dalam distribusi barang dan jasa diperlukan keterpaduan moda sarana transportasi.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021, diolah

Gambar 5.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan menyebabkan transportasi laut dan udara menjadi kebutuhan vital, namun membutuhkan dana pembangunan yang cukup besar. Keterkaitan moda transportasi laut, udara, dan darat dibangun untuk meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar guna meningkatkan akselerasi perekonomian.

Infrastruktur berikutnya yang masih perlu pengembangan adalah yang berkaitan dengan ketersediaan listrik. Berdasarkan data Susenas 2021 masih terdapat rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik. Keberadaan jaringan listrik sangat berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk itu berbagai usaha perluasan jaringan listrik mutlak diperlukan.

BAB VI

Disparitas Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

Perkembangan Selisih
IPM Kab/Kot Tertinggi dan
Terendah di Provinsi Kepri

Disparitas

2018

16,48

2019

16,11

2020

15,82

2021

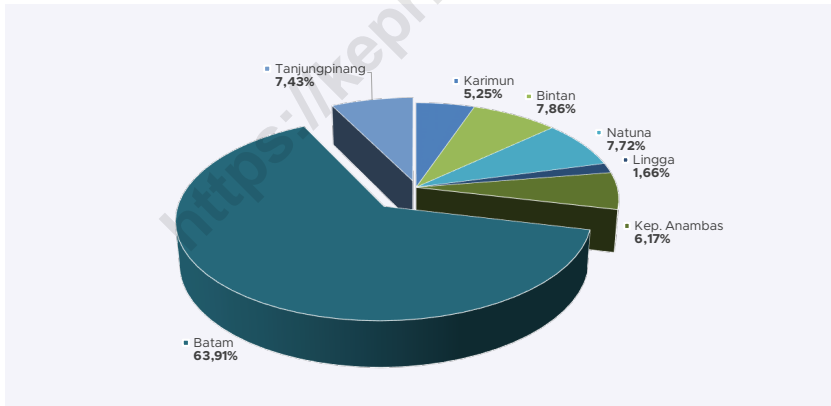
15,29

IPM Tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau adalah **Kota Batam** dan yang Terendah adalah **Kab. Lingga**

Disparitas Pembangunan Manusia Kepulauan Riau

Disparitas atau ketimpangan pembangunan merupakan masalah yang lazim muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu wilayah. Disparitas pembangunan antardaerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam. Disparitas pembangunan merupakan kendala untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, agenda pemerataan pembangunan masih menjadi agenda pokok pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Disparitas pembangunan antardaerah dalam jangka panjang dapat memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat dan secara langsung akan mempengaruhi kualitas manusianya. Oleh sebab itu, perbandingan pencapaian pembangunan manusia antardaerah menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang selanjutnya digunakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6.1. Kontribusi Kabupaten/Kota Terhadap Total PDRB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Seperti diketahui bahwa perekonomian Kepulauan Riau ditopang oleh Kota Batam. BPS mencatat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Riau tahun 2021 didominasi oleh Kota Batam (Gambar 6.1.). Dominasi ekonomi yang kuat di Kota Batam diduga sebagai cikal bakal semakin lebarnya kesenjangan pembangunan di berbagai dimensi kehidupan antara Kota Batam dengan kabupaten/kota lainnya. Oleh karena

itu, dalam kajian ini menarik untuk membahas mengenai kesenjangan pembangunan antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau.

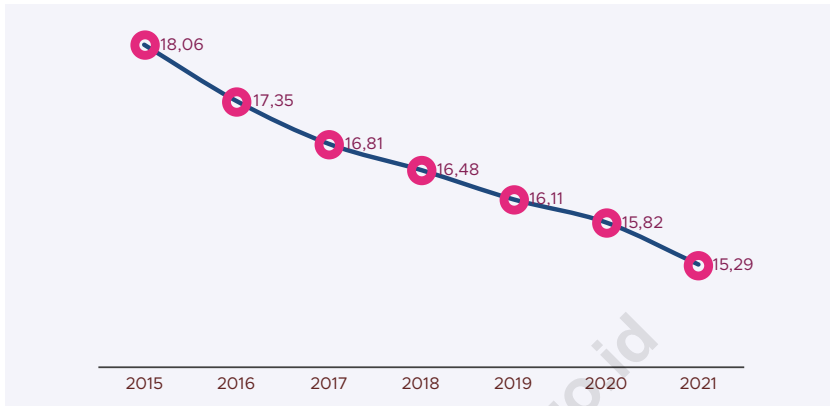
Kesenjangan Pembangunan Manusia antara Batam dan Kabupaten/Kota Lainnya

Kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota Batam merupakan kota di Kepulauan Riau yang berada di perairan Selat Malaka dan berbatasan laut dengan Singapura. Batam sendiri merupakan nama salah satu pulau terbesar di wilayah Kota Batam yang seluruhnya terdiri atas 329 pulau. Pulau Batam sejak zaman dahulu telah dikenal di berbagai penjuru dunia karena letak geografisnya yang berada di jalur utama perdagangan dunia. Mengingat letaknya yang cukup strategis, pada tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi. Infrastruktur modern dibangun sehingga menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan investasi di Batam.

Berbeda dengan Batam, Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau dikembangkan sebagai pusat pemerintahan. Tentu saja perekonomian Tanjungpinang berjalan lebih stabil dibandingkan Batam yang cukup meroket. Selain Batam dan Tanjungpinang, masih ada lima kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau yang secara kasat mata perekonomiannya jauh lebih kecil dibandingkan Batam. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup tajam antara Batam dengan kabupaten/kota lainnya.

Kesenjangan Pembangunan Manusia AntarKabupaten/Kota

Kesenjangan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau masih cukup tinggi. Kota Batam masuk dalam kategori pembangunan manusia “sangat tinggi”, sedangkan beberapa kabupaten/kota (Tanjungpinang, Bintan, Natuna, dan Karimun) masuk dalam kategori pembangunan manusia “tinggi” dan masih ada kabupaten yang berada pada kategori pembangunan manusia “sedang” yaitu Kepulauan Anambas dan Lingga. Pada tahun 2021, IPM Kota Batam tercatat sebesar 81,12, merupakan IPM tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan IPM terendah yaitu Kabupaten Lingga sebesar 65,83. Kesenjangan tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut terus menerus ke generasi yang akan datang. Perlu suatu upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sebagai titik awal menuju pemerataan pembangunan.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6.2. Perkembangan Disparitas IPM di Kepulauan Riau, 2015-2021

Hingga tahun 2021, terjadi peningkatan pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota. Peningkatan pembangunan manusia tersebut diiringi dengan penurunan kesenjangan pembangunan manusia dari tahun ke tahun. Dalam hal ini upaya pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat di Kepulauan Riau untuk meningkatkan kesejahteraan secara adil dan merata perlu diapresiasi. Namun demikian, upaya pemerataan kesenjangan pembangunan manusia perlu tetap dilanjutkan untuk mencapai konvergensi pembangunan. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 6.2. secara lebih lengkap.

Kesenjangan Kesehatan

Kesenjangan kesehatan antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau semakin menurun. Selama periode 2015 hingga 2021. Selisih UHH (jarak antara UHH tertinggi dengan UHH terendah) semakin kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan kesehatan masyarakat Kepulauan Riau semakin membaik. Namun demikian, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat tetap harus terus ditingkatkan karena sejatinya seluruh penduduk memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa terkecuali.

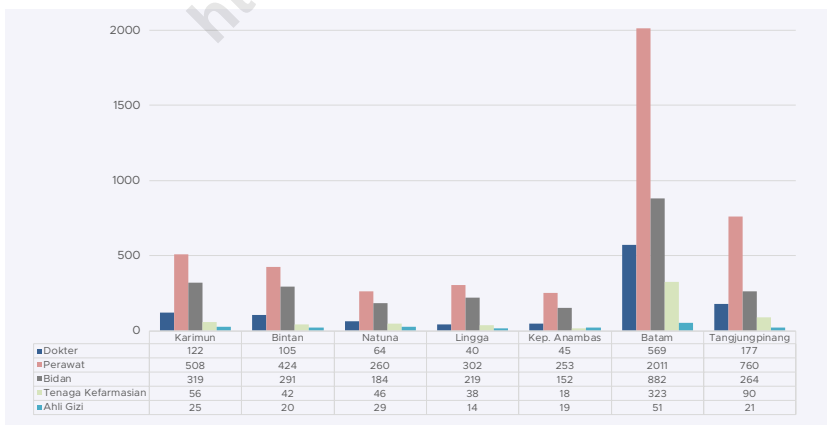
Tahun 2021, kesenjangan UHH antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau sebesar 10,97, tergolong tinggi dimana UHH tertinggi di Kota Batam sebesar 73,36 dan AHH terendah di Lingga sebesar 62,39. Apabila ditelusuri lebih mendalam, terdapat indikasi bahwa pembangunan kesehatan masyarakat antara Batam dan Lingga disebabkan oleh kesenjangan fasilitas kesehatan masyarakat dan jumlah tenaga medis.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6.3. Perkembangan Disparitas UHH di Kepulauan Riau, 2015-2021

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencatat bahwa pada tahun 2021, jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di Batam sebanyak 12 unit rumah sakit dan 23 puskesmas, sedangkan di Lingga hanya memiliki 2 unit rumah sakit dan 12 puskesmas. Kemudian, dari sisi jumlah tenaga medis, Batam memiliki 3.836 tenaga medis dari berbagai kalangan (seperti: dokter, farmasi, perawat, bidan, ahli gizi), sedangkan Lingga hanya memiliki 613 tenaga medis saja.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6.4. Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 6.4. di atas menunjukkan bahwa Batam mendominasi, sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki tenaga medis yang jumlahnya jauh di bawah Batam. Kesenjangan pembangunan kesehatan ini perlu ditindaklanjuti bersama antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat karena kesenjangan disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah namun juga budaya masyarakat, sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Tentunya, pembangunan kesehatan ini harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar kesenjangan juga semakin mengecil.

Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan di Kepulauan Riau juga memiliki tren yang baik, semakin lama semakin menurun. Selisih rata-rata lama sekolah antara Kota Batam (kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di Kepulauan Riau) dan Kabupaten Lingga (kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah terendah di Kepulauan Riau) cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2021.



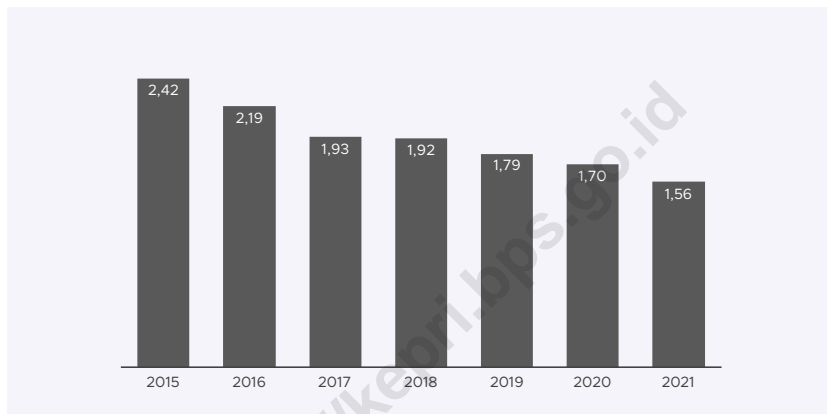
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6.5. Perkembangan Disparitas RLS di Kepulauan Riau, 2015-2021

Kesenjangan pendidikan juga terlihat dari rentang angka harapan lama sekolah tertinggi dan terendah. Kesenjangan angka harapan lama sekolah tahun 2021 di tingkat kabupaten/kota terjadi akibat perbedaan capaian antara Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Karimun. Pada tahun 2021, rata-rata penduduk usia 7 tahun di Kota Tanjungpinang memiliki

peluang untuk menempuh pendidikan selama 14,13 tahun, sedangkan di Kabupaten Karimun hanya memiliki peluang 12,57 tahun.

Dibandingkan rata-rata lama sekolah, kesenjangan angka harapan lama sekolah tidak terlalu jauh. Tercatat selama 2015 hingga 2021 selisih angka harapan lama sekolah tertinggi dengan terendah di tingkat kabupaten/kota terus menurun.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6.6. Perkembangan Disparitas HLS di Kepulauan Riau, 2015-2021

Kesenjangan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Dimensi standar hidup layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Secara series terlihat bahwa ada kecenderungan kesenjangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang semakin melebar. Namun, di tahun 2021 menunjukkan sedikit perbaikan dimana disparitas menjadi 6,16.

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan tertinggi di Kepulauan Riau berada di Kota Batam yakni sebesar Rp 18,03 juta per tahun, sedangkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan terendah berada di Kabupaten Karimun sebesar Rp 11,88 juta per tahun.

Kesenjangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kepulauan Riau disebabkan oleh bertumpunya kegiatan ekonomi di Kota Batam sehingga kegiatan ekonomi di Batam lebih bervariasi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Tercatat bahwa PDRB yang mencerminkan tingkat pendapatan di suatu wilayah antarkabupaten/kota di Kepulauan

Riau tahun 2021, lebih dari 60 persen ekonomi Provinsi Kepulauan Riau ditopang oleh Kota Batam. Artinya, peranan Kota Batam terhadap Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengatur kebijakan ekonomi sedemikian rupa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam rangka pemerataan ekonomi antara Batam dengan kabupaten/kota lainnya.

Secara series terlihat bahwa ada kecenderungan yang semakin melebar pada kesenjangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Namun, di tahun 2021 menunjukkan sedikit perbaikan dimana kesenjangan menjadi 6,16 dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,22.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 6.7. Perkembangan Disparitas Pengeluaran per kapita per Tahun yang Disesuaikan di Kepulauan Riau, 2015-2021



Bab VII

Implikasi Kebijakan

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2021 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- IPM di Provinsi Kepulauan Riau selama periode pengamatan terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 mencapai 75,79 poin. Angka IPM Kepulauan Riau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan sejak tahun 2015 IPM Kepulauan Riau termasuk dalam kategori tinggi. Secara nasional IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 menempati urutan keempat, sedangkan di kawasan pulau Sumatera menempati urutan teratas.
- Ditinjau secara spasial, pada tahun 2021 IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam yaitu mencapai 81,12, sedangkan yang terendah ditempati oleh Kabupaten Lingga yaitu sebesar 65,83. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakmerataan keberhasilan pembangunan manusia antarkabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.
- Disparitas IPM antarkabupaten/kota di Kepulauan Riau selama periode 2015-2021 cenderung menurun yang mengindikasikan adanya perbaikan kesenjangan. Bila dilihat menurut dimensi penyusunnya, baik dimensi umur panjang dan hidup sehat maupun pengetahuan menunjukkan tren disparitas yang menurun, sedangkan dimensi standar hidup layak menunjukkan tren disparitas yang cenderung meningkat meskipun di tahun 2021 mengalami sedikit perbaikan.
- Adapun tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dalam upaya pemerataan pembangunan manusia di Kepulauan Riau adalah tantangan demografis dan infrastruktur. Distribusi penduduk yang tidak merata secara tidak langsung mencerminkan modal fisik dan modal manusia yang tidak merata. Karakteristik demografi yang berbeda yang disebabkan oleh proses migrasi dan urbanisasi juga membuat budaya dan sudut pandang penduduk terhadap suatu nilai hidup juga akan berbeda. Selain itu, perbedaan akses infrastruktur antardaerah seperti akses terhadap layanan dan fasilitas kesehatan, perumahan, pendidikan dan akses terhadap lapangan kerja membuat perkembangan pembangunan manusia yang juga berbeda antardaerah.

- Kabupaten Lingga merupakan kabupaten dengan pertumbuhan IPM tercepat di Kepulauan Riau pada tahun 2021. IPM Kabupaten Lingga tumbuh sampai dengan 0,83 persen. Sebaliknya, Kota Batam merupakan kabupaten/kota dengan pertumbuhan IPM terlambat di Kepulauan Riau. IPM Kota Batam tahun 2021 tumbuh sebesar 0,01 persen.

7.2. Implikasi Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan capaian dan pemerataan pembangunan manusia perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam penyusunan pembangunan sebagai berikut:

- Pada level provinsi, capaian IPM dapat ditingkatkan dengan intervensi melalui kebijakan regulasi dan kebijakan penganggaran pada dimensi/indikator IPM yang masih rendah, seperti umur harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
- Dari sisi spasial, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu untuk mendorong kabupaten/kota dengan capaian IPM relatif rendah seperti Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Karimun baik dengan kebijakan regulasi maupun penganggaran. Bagi pemerintah kabupaten yang bersangkutan perlu mengoptimalkan anggaran untuk pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
- Dari aspek pendidikan, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah secara umum masih jauh dari harapan. Capaian ini memang tidak dapat serta merta ditingkatkan dalam jangka pendek, perlu dibangun kesadaran akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi bagi masyarakat dan perhatian yang konsisten dari pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kecukupan dan kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses terhadap pendidikan untuk semua.
- Dari aspek kesehatan, perlu diteruskan upaya yang konsisten dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, lingkungan dan sanitasi yang sehat, air yang layak, dan perumahan yang sehat bagi seluruh masyarakat. Secara umum, proses kelahiran anak lahir hidup di Provinsi Kepulauan Riau dibantu oleh bidan (50,29 persen) dan dokter kandungan (47,58 persen).

- Dari aspek ekonomi, daya beli penduduk Provinsi Kepulauan Riau secara spasial terjadi disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota. Kondisi ketimpangan dalam perekonomian terlihat jelas dari disparitas yang cukup tinggi dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto yang sangat didominasi oleh Kota Batam lebih dari 60 persen dengan pergerakan PDRB yang lamban di kabupaten kota lainnya. Oleh karena itu agar pertumbuhan ekonomi dapat cepat dan berkualitas, maka perlu ada dukungan dalam membangun infrastruktur dasar yang memadai khususnya untuk kabupaten/kota non Batam di Kepulauan Riau, antara lain: transportasi, air bersih, listrik dan telekomunikasi.

<https://kepri.bps.go.id>

Lampiran

Sampling Error Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021

Kabupaten/Kota	Est	SE	Laki-laki		CI	
			RSE	Min	Max	
Karimun	9,63	2,30	23,93	5,10	14,15	
Bintan	3,43	0,90	26,11	1,67	5,19	
Natuna	4,59	0,93	20,19	2,77	6,41	
Lingga	8,13	1,44	17,74	5,29	10,96	
Kep. Anambas	5,11	1,68	32,81	1,81	8,40	
Batam	4,67	0,67	14,43	3,34	5,99	
Tanjungpinang	3,23	0,77	23,86	1,72	4,75	
KEPULAUAN RIAU	5,09	0,51	9,96	4,10	6,09	

Lanjutan

Kabupaten/Kota	Est	SE	Perempuan		CI	
			RSE	Min	Max	
Karimun	10,56	2,39	22,67	5,86	15,27	
Bintan	3,45	1,10	31,92	1,28	5,61	
Natuna	5,92	1,26	21,33	3,44	8,40	
Lingga	9,86	1,50	15,20	6,92	12,81	
Kep. Anambas	4,55	1,41	30,97	1,78	7,32	
Batam	4,24	0,60	14,23	3,05	5,42	
Tanjungpinang	3,52	1,00	28,51	1,55	5,49	
KEPULAUAN RIAU	5,02	0,49	9,69	4,06	5,97	

Lanjutan

Kabupaten/Kota	Est	Laki-laki dan Perempuan			
		SE	RSE	CI	
				Min	Max
Karimun	10,08	2,20	21,79	5,76	14,40
Bintan	3,44	0,87	25,38	1,72	5,15
Natuna	5,24	0,92	17,62	3,42	7,05
Lingga	8,98	1,27	14,13	6,48	11,47
Kep. Anambas	4,84	1,44	29,80	2,00	7,67
Batam	4,45	0,55	12,25	3,38	5,52
Tanjungpinang	3,38	0,80	23,58	1,81	4,94
KEPULAUAN RIAU	5,06	0,43	8,60	4,20	5,91

Sampling Error Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, 2021

Kabupaten/Kota	Est	Sumber Air Minum Bersih			
		SE	RSE	CI	
				Min	Max
Karimun	79,87	3,93	4,92	72,16	87,59
Bintan	71,20	4,05	5,68	63,24	79,16
Natuna	81,34	3,24	3,99	74,96	87,72
Lingga	79,07	3,39	4,28	72,41	85,73
Kep. Anambas	63,95	4,31	6,74	55,48	72,43
Batam	98,81	0,65	0,66	97,52	100,00
Tanjungpinang	87,39	2,61	2,99	82,26	92,52
KEPULAUAN RIAU	91,99	0,74	0,81	90,53	93,45

Sampling Error Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Informal pada Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2021

Jenis Kelamin	7-12 Tahun				CI	
	Est	SE	RSE	Min	Max	
Laki-laki	99,42	0,42	0,42	98,59	100,00	
Perempuan	99,83	0,08	0,08	99,66	99,99	
Laki-laki dan Perempuan	99,62	0,22	0,22	99,19	100,00	

Jenis Kelamin	13-15 Tahun				CI	
	Est	SE	RSE	Min	Max	
Laki-laki	98,10	1,19	1,21	95,77	100,00	
Perempuan	99,67	0,18	0,18	99,32	100,00	
Laki-laki dan Perempuan	98,85	0,64	0,64	97,60	100,00	

Jenis Kelamin	16-18 Tahun				CI	
	Est	SE	RSE	Min	Max	
Laki-laki	80,83	3,18	3,94	74,6	87,07	
Perempuan	87,84	2,87	3,26	82,22	93,45	
Laki-laki dan Perempuan	84,40	2,17	2,57	80,15	88,66	

Sampling Error Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Informal pada Penduduk Berumur 5-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2021

Jenis Kelamin	Est	SE	SD		CI	
			RSE	Min	Max	
Laki-laki	98,87	0,54	0,54	97,82	99,92	
Perempuan	99,68	0,10	0,10	99,48	99,88	
Laki-laki dan Perempuan	99,26	0,28	0,28	98,71	99,81	

Jenis Kelamin	Est	SE	SMP		CI	
			RSE	Min	Max	
Laki-laki	85,72	2,69	3,14	80,45	91,00	
Perempuan	87,58	2,73	3,12	82,22	92,93	
Laki-laki dan Perempuan	86,60	1,92	2,22	82,84	90,37	

Jenis Kelamin	Est	SE	SMA		CI	
			RSE	Min	Max	
Laki-laki	71,53	3,85	5,39	63,97	79,08	
Perempuan	75,12	3,84	5,12	67,59	82,66	
Laki-laki dan Perempuan	73,36	2,68	3,66	68,10	78,62	

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124

Telp: (0771) 4500155

Homepage: kepri.bps.go.id Email: bps2100@bps.go.id

ISSN 2776-5539



9 772776 553004 >